

**IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
MELALUI PROGRAM USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM)
Pada Dinas Koperasi Usaha Mikro Dan Perdagangan Kota Batu**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik



**OLEH:
NURHAENI JAYA
2016210136**

**KOMPETENSI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADDEWI
MALANG
2020**

RINGKASAN

Beberapa persoalan yang dialami oleh pelaksana UMKM di Kota Batu adalah pemasaran hasil produksi. Saat ini jumlah pelaku usaha di Kota Batu terdapat ± 1.500 usaha. Mulai dari pengusaha makanan, rujak, keramik, dan sebagainya. Sedangkan untuk bias masuk dalam pasar online ini para pelaku usaha harus memiliki izin dari BPOM atau minimal Produk Industri Rumah Tangga (PIRT). Sebab hal tersebut menjadi syarat utama agar produk bisa dipasarkan. Selain itu juga kemasan harus menarik, bersih dan bagus. Untuk mempermudah pengembangan UMKM yang ada di Kota Batu akan dilakukan secara maksimal. Maka Pemerintah Kota Batu akan menyediakan mesin yang tidak dimiliki para pelaku UMKM salah satunya mesin *packing* atau kemasan, dimana hal ini menjadi faktor kurang maksimalnya produk UMKM yang di pasarkan.

Adapun tujuan penulis melakukan penelitian ini ialah untuk mengetahui Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Usaha Mikro Kecil Menengah pada Diskumdag Kota Batu, dan untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Usaha Mikro Kecil Menengah pada Diskumdag Kota Batu.

Kata Kunci : Implementasi, Pemberdayaan masyarakat, Program UMKM

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kompas.com (Maret 2019) melansir bahwa Anggota Komisi IV DPR RI Nevi Zuairina menyampaikan Pengkategorian penduduk miskin di Indonesia berada di bawah standar dunia yaitu 2 dollar AS, sementara untuk Indonesia sendiri hanya 1 dollar AS. Badan Pusat Statistika (BPS) pada Maret 2019 mengungkapkan bahwa tolak ukur garis kemiskinan untuk penduduk Indonesia mencapai Rp 425.250 per kapita tiap bulannya. Adapun garis kemiskinan primer (makanan) mencapai Rp 313.232 (76 %) dan garis kemiskinan sekunder (tidak termasuk makanan) mencapai Rp 112.081 (26,34 %). Maka dapat dikatakan bahwa orang miskin yang berada di Indonesia mempunyai penghasilan sebesar Rp 14.175 atau setara dengan 1 dollar AS setiap harinya.

Menurut data peta penyebaran kemiskinan yang dikeluarkan BPS, terdapat 3 (tiga) Provinsi di pulau Jawa masuk dalam kategori penduduk miskin terbanyak dibandingkan provinsi lainnya, diantaranya yaitu Provinsi Jawa Timur jumlah penduduk miskin tercatat sebanyak 4,11 juta jiwa, Jawa Tengah tercatat sebanyak 3,74 juta jiwa, dan Jawa Barat tercatat sebanyak 3,4 juta jiwa. Dari data tersebut menunjukkan bahwa tingginya angka kemiskinan menuntut semua pihak, terutama pemerintah agar mengurangi angka kemiskinan melalui berbagai program yang direalisasikan. Merealisasikan setiap program yang sudah direncanakan, menjadi salah satu tahapan pemerintah untuk meningkatkan pendapatan dan kualitas hidup masyarakat serta mengurangi angka kemiskinan (Kompas.com, 11 Maret 2019).

Pemberdayaan masyarakat dalam proses pembangunan adalah usaha keras yang dilakukan agar mempersiapkan masyarakat sejalan dengan usaha memperkuat kelembagaan masyarakat supaya mampu mewujudkan kemajuan, kesejahteraan dan kemandirian dalam tatanan keadilan sosial daerah yang berkelanjutan. Sementara itu, pemberdayaan masyarakat pun menjadi suatu usaha untuk meningkatkan harkat dan martabat masyarakat, dimana saat ini mengalami kesulitan sehingga bisa membebaskan diri dari keterbelakangan dan kemiskinan. Pada dasarnya, konsep pemberdayaan ialah usaha atau upaya memandirikan dan mensejahterakan masyarakat (Rosidin, 2019:70-74).

Semenjak awal era Orde Baru sampai saat ini, Pemerintah Indonesia sudah banyak menerapkan semua jenis program agar mendorong perkembangan dan pertumbuhan UMKM. Diakui bahwa, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sangat diharapkan agar terus berperan dalam mengurangi angka pengangguran dan menyerap banyak tenaga kerja, sehingga Pemerintah dapat menjalankan strategi upaya memerangi kemiskinan di dalam negeri terutama di bagian daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau. Tidak cukup sampai disitu, Pemerintah Indonesia juga mengeluarkan Undang-Undang UMKM (2008), dan memiliki sebuah departemen khusus untuk menangani UKM, yaitu Kementerian Koperasi dan UMKM. Bahkan di dalam UU Penanaman Modal yang terakhir pun dicantumkan pasal-pasal khusus terkait kelompok UMKM dan diketahui juga untuk beberapa tahun belakangan ini, diadakannya Kredit Usaha Rakyat (KUR) (Tambunan, 2017: v).

Diungkapkan oleh Hardjanto (2014: 17) bahwa di masa globalisasi dengan hal ihwal rivalitas di berbagai aspek yang semakin kuat, pemerintah daerah dituntut agar memperbaiki pola orientasi global. Pemerintah diminta mengatur organisasi birokrasinya dan *Mindset Birokratik* ke *Mindset Entrepreneur*. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu motivasi/dorongan dari *stakeholder* atau entitas-entitas terkait yang berhubungan langsung dengan sektor swasta untuk fokus membentuk UMKM melalui peningkatan sumber daya manusia (SDM) misalnya pelatihan, promosi dan pendampingan agar UMKM dapat terus maju dan berkembang (Alves, dkk, 2015: 4).

Sama halnya dengan negara lain khususnya negara sedang berkembang, perkembangan atau pertumbuhan UMKM di Indonesia mengalami berbagai kendala. Kendala-kendala itu terbilang berselisih di satu daerah dengan daerah lain, antar pedesaan dan perkotaan, antar bidang, atau antar sesama perusahaan di bidang yang serupa. Walaupun begitu, terdapat beberapa permasalahan yang konvensional bagi seluruh pelaksana UMKM di berbagai negara, terkhusus di kalangan negara yang masih merakah. Permasalahan-permasalahan yang lumrah itu mencakup dependensi aset operasional dan permodalan, permasalahan serius penjualan, diseminasi penyediaan bahan pokok, dan *input* lainnya, dependensi kanal informasi terkait prospek bursa dan sebagainya, rendahnya kualitas SDM dan kemampuan kapabilitas berteknologi, upah pengiriman dan intensitas yang tinggi, akses komunikasi yang terbatas, tingginya upah karena tata cara administrasi dan birokrasi yang bertautan dalam pembuatan izin usaha, serta

ketidaksesuaian disebabkan peraturan dan kebijakan-kebijakan perniagaan yang tak menentu atau tujuan yang kurang jelas (Tambunan, 2017: 44-45).

Beberapa persoalan yang dialami pelakon UMKM di Kota Batu adalah pemasaran hasil produksi. Saat ini jumlah pelaku usaha di Kota Batu terdapat \pm 1.500 usaha. Mulai dari pengusaha makanan, rujak, keramik, dan sebagainya. Sedangkan untuk bias masuk dalam pasar online ini para pelaku usaha harus memiliki izin dari BPOM atau minimal Produk Industri Rumah Tangga (PIRT). Sebab hal tersebut menjadi syarat utama agar produk bisa dipasarkan. Selain itu juga kemasan harus menarik, bersih dan bagus. Dengan adanya izin itu sudah tentu mendapatkan kepercayaan dari konsumen (Malangtimes.com, 17 Maret 2019). Disampaikan juga oleh Pemkot Batu melalui Malang Times.com pada tanggal 18 Mei 2018 supaya memperluas dan memperlancar usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Kota Batu akan dilakukan secara maksimal. Maka Pemerintah Kota Batu akan menyediakan mesin yang tidak dimiliki para pelaku UMKM salah satunya mesin packing atau kemasan yang menjadi faktor kurang maksimalnya produk UMKM yang di pasarkan.

Berdasarkan dari pembahasan diatas, sehingga penulis terdorong hendak mengangkat suatu penelitian berjudul **“IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) Pada Dinas Koperasi Usaha Mikro Dan Perdagangan Kota Batu”**.

1.2 **Rumusan Masalah**

Berlandaskan latar belakang yang sudah diuraikan diatas, maka peneliti membatasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Usaha Mikro Kecil Menengah pada Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Batu?
2. Apa saja Faktor pendukung dan penghambat Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Usaha Mikro Kecil Menengah pada Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Batu?

1.3 **Tujuan Penelitian**

- 1 Untuk mengetahui Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Usaha Mikro Kecil Menengah pada Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan kota Batu;
- 2 Untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Usaha Mikro Kecil Menengah pada Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Batu.

2.1 **Manfaat Penelitian**

Beberapa manfaat yang diharapkan melalui penelitian ini, yaitu antara lain sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan dan wawasan peneliti sendiri dalam bidang Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Usaha Mikro Kecil Menengah.

2. Bagi Pelaksana Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah

Sebagai salah satu bahan acuan pertimbangan dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Usaha Mikro Kecil Menengah. Sedangkan bagi pihak lain dapat dijadikan sebagai bahan bacaan, rujukan, referensi atau karya ilmiah untuk penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anoraga, Pandji. 2010. *Ekonomi Islam Kajian Makro dan Mikro*. Yogyakarta: PT. Dwi Chandra Wacana.
- Awang, Azam. 2010. *Implementasi Pemberdayaan Pemerintahan Desa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mahmud. 2011. *Metode Penelitian pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Moleong. 2014. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mukarom, Zaenal. & Muhamad Wijaya Laksana. 2018. *Manajemen Pelayanan Publik*. Bandung: Pustaka Setia.
- Nugroho, Riant. 2017. *Public Policy: Edisi 6*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Rosidin, Utang. 2019. *Pemberdayaan Desa Dalam Sistem Pemerintahan Daerah*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Sanusi, Anwar. 2016. *Metode Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Solichin, Abdul Wahab. 2014. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Statistik, Badan Pusat. 2019. *Analisis Hasil SE2006 Lanjutan Potensi Peningkatan Kinerja Usaha Mikro Kecil*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Subarsono, AG. 2010. *Analisis Kebijakan Publik: Analisis, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Suharto, Edi. 2017. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Rafika Aditama.

Tambunan, Tulus T. H. 2017. *Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Totok dan Poerwoko. 2012. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Widodo, Joko. 2017. *Analisis kebijakan Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Publishing.

Zet, M. 2014. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Peraturan Daerah (PERDA) Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Batu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan Dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah.

Jurnal dan Skripsi

Alves, dkk. 2015. *Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Dalam Upaya Penguatan Modal Usaha Di Timor Leste*. JISIP: Universitas Brawijaya (JISIP, Volume 4, No. 2 Tahun 2015).

Eka & Merry. 2109. *Implementasi Program Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (Pada Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan)*. JISIP: Universitas Tribhuwana Tungadewi (JISIP, Volume 8, No. 2 Tahun 2019).

Hardjanto, H. 2014. *Entrepreneur Governance*. Universitas Brawijaya Press (UB Press) Kode mk/sks UB U 4001/3 SKS

- Herlyansah, Pradytia. 2016. *Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Tangerang*. Skripsi: Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- Huta, Rauf A. 2010. *Pemberdayaan dan Pendampingan Sosial dalam Masyarakat (kajian teori)*. Inovasi: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Gorontalo (Inovasi, Volume 7, No. 4, Desember 2010).
- Raja, Imelda Napa. 2018. *Implementasi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pelatihan Membatik*. Skripsi: Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang.
- Shofi, M. 2018. *Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Pengentasan Kemiskinan dibidang Pendidikan*. Skripsi: Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang.
- Sucipto & Sutarto. 2015. *Pemberdayaan Masyarakat Miskin untuk Meningkatkan Kecakapan Hidup melalui Kursus Menjahit di LKP Elisa Tegal*. *Journal Of Nonformal Education and Community Empowerment*. Universitas Negeri Semarang (volume 4, nomor 2, tahun 2015)
- Widjajanti, Kesi. 2011. *Model Pemberdayaan Masyarakat*. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*: Universitas Semarang (volume 12, No. 1. Juni 2011. Hal. 15-27).

Internet

- Batu. Shining. 2020. *Pemerintah Kota Katu* (<https://batukota.go.id/Portal/profil#1> (Online)).
- Fitriyani, Parwita dkk. 2017. *Indikator Pemberdayaan Masyarakat*. (https://www.scribd.com/document/348046218/INDIKATORPEMBERDAYAAN_MASYARAKAT-docx diakses pada tanggal 11 Mei 2017 (Online)).
- Kompas.com. 2019. *Anggota Komisi IV: Garis Kemiskinan Indonesia Di bawah Standar Dunia*. (<https://nasional.kompas.com/read/2019/11/11/16553951/anggota-komisi-iv-garis-kemiskinan-indonesia-di-bawah-standar-dunia> diakses pada tanggal 11 November 2019 (Online)).

- Statistik, Badan Pusat. 2017. *Sandingan Data UMKM 2012-2017*. (<https://www.coursehero.com/file/36038489/SANDINGAN-DATA-UMKM-2017.pdf/> diakses pada tanggal 12 Oktober 2019 (Online)).
- Statistik, Badan Pusat. 2020. *Kota Batu Dalam Angka 2020*. (<https://batukota.bps.go.id/publication/2020/04/27/383dbaff7616e98ac9d0571c/kota-batu-dalam-angka-2020.html> diakses pada tanggal 27 April 2020 (Online)).
- Statistik, Badan Pusat. 2020. *Statistik Daerah Kota Batu 2020* (<https://batukota.bps.go.id/publication/2020/08/06/ee333686b6c67d4e11a072c2/statistik-daerah-kota-batu-2020.html> diakses pada tanggal 6 Agustus 2020 (Online)).
- Suprayitno, Desika Karinayah. 2018. *Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Sidoarjo* (http://repository.unair.ac.id/74627/3/JURNAL_Fis.AN.61%2018%20Su%20p.pdf diakses pada tanggal 11 Oktober 2018 (Online)).
- Times.com, Malang. 2018. *Permudah Pemasaran, UMKM Batu Dibantu AAPI*. (<https://www.malangtimes.com/baca/24755/20180206/184057/permudah-pemasaran-umkm-batu-dibantu-aapi> diakses pada tanggal 06 Februari 2018 (Online)).
- Times.com, Malang. 2019. *Pemkot Siapkan Website Khusus untuk Pasar Online Seluruh Produk UMKM Kota Batu* (<https://www.malangtimes.com/baca/37121/20190317/185200/pemkot-siapkan-website-khusus-untuk-pasar-online-seluruh-produk-umkm-kota-batu> diakses pada tanggal 17 Maret 2019 (Online)).
- Times.com, Malang. 2018. *Pemkot Batu Bangun Kompleks UMKM Terintegrasi, Dilengkapi Mesin Modern Canggih* (<https://www.malangtimes.com/baca/27697/20180518/103219/pemkot-batu-bangun-kompleks-umkm-terintegrasi-dilengkapi-mesin-modern-canggih> diakses pada tanggal 18 Mei 2018 (Online)).
- News.com, Antara. 2019. *Sebanyak 10 UKM Kota Batu akan ikuti World Expo 2020 Dubai* (<https://www.antaranews.com/berita/916590/sebanyak-10-ukm-kota-batu-akan-ikuti-world-expo-2020-dubai> diakses pada tanggal 17 Juni 2019 (Online)).
- Voice.com, Malang. 2019. *Pemkot Batu Pertemukan UMKM dan Pelaku Usaha dengan Pasar Murah* (<https://malangvoice.com/pemkot-batu-pertemukan->

[umkm-dan-pelaku-usaha-dengan-pasar-murah/](#) diakses pada tanggal 20 November 2019 (Online)).